

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

RUTH DAMAYANTI SIHOMBING

NPM: 2110012111072

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Reg No: 24/Skripsi/HTN/FH/V111-2025

Nama : **Ruth Damayanti Sihombing**
Nomor : **2110012111072**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kota Padang Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Nurbeti, S.H.,M.H. (Pembimbing)

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**Ruth Damayanti Sihombing¹, Nurbeti, S.H., M.H.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : ruthdamayanti0606@gmail.com**

ABSTRAK

Child protection in Indonesia has been regulated under Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Handling children in conflict with the law requires a special approach that differs from adults, considering that children are still in the stage of growth and development and are vulnerable to the negative impacts of the legal process. Therefore, the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) plays a strategic role as a mediator and companion in ensuring that children's rights are fulfilled during legal proceedings, while also providing protection services in line with national and international standards. This research adopts a juridical-sociological method, with data collected through document studies and interviews. The findings show that DP3AP2KB in Padang City contributes significantly through protection, assistance, and rehabilitation programs. However, challenges such as lack of family support in children's education and suboptimal inter-institutional coordination remain obstacles. To overcome these issues, DP3AP2KB implements Child Protection Services (P2A) with a focus on upholding children's rights as the central principle.

Keywords: DP3AP2KB, Children in Conflict with the Law, Child Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti anak-

anak. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dari ancaman ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

yang menegaskan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara sehingga berhak mendapatkan perlindungan khusus.¹

Namun, dalam kenyataannya, permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum masih marak terjadi. Data di Kota Padang menunjukkan peningkatan kasus anak yang terjerat dalam tindak pidana, baik pencurian, penganiayaan, tawuran, maupun kejahatan seksual. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan justru harus berhadapan dengan stigma sosial, tekanan psikologis, dan hambatan reintegrasi sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang hadir sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat perlindungan terhadap anak. Peranan DP3AP2KB tidak sebatas pada pendampingan hukum, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikososial, edukasi keluarga, hingga upaya reintegrasi sosial.

¹ Zulfiani, 2019, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No.3.

Mengingat kompleksitas permasalahan anak berkonflik dengan hukum, maka analisis mendalam mengenai peran, kendala, dan upaya DP3AP2KB menjadi penting sebagai evaluasi implementasi perlindungan anak di tingkat daerah.²

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang?

² Suliyanti, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan”. *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol 3, No.1, hlm1-18.

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di kota Padang?
3. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam

menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang.

3. Untuk menganalisa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang berupa studi empiris untuk menemukan teori- teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan bahan kepustakaan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang

- 1) Memberikan pendampingan hukum, psikologis dan sosial.
- 2) Menjalankan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan.
- 3) Melakukan edukasi, penyuluhan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum serta masyarakat.
- 4) Menjadi mediator dalam penerapan prinsip keadilan.

B. Kendala – Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang

- 1) Minimnya edukasi dan peran keluarga dalam mendidik anak.
- 2) Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sekolah)
- 3) Keterbatasan SDM, anggaran, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap ABH.

C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi kendala dalam menangani anak yang

berkonflik dengan hukum di Kota Padang

- 1) Menjalankan Pelayanan Perlindungan Anak (P2A) berbasis multidisipliner.
- 2) Membentuk pusat layanan terpadu dengan dukungan tenaga profesional.
- 3) Meningkatkan kerja sama lintas lembaga dan organisasi masyarakat sipil.
- 4) Melakukan penyuluhan dan pelatihan parenting bagi keluarga.
- 5) Mengembangkan sistem informasi terpadu dan metode konseling ramah anak.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB Kota Padang berperan strategis dalam penanganan anak yang berkonflik hukum melalui perlindungan, pendampingan dan rehabilitasi. Kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya peran keluarga, koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Upaya dinas meliputi penguatan layanan perlindungan anak, edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

B. Saran

Melalui kesimpulan tersebut, terdapat saran yaitu:

- 1) Peningkatan peran

- Keluarga melalui program edukasi parenting.
- 2) Optimal koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sosial.
 - 3) Penambahan anggaran dan tenaga ahli untuk mendukung layanan perlindungan anak.
 - 4) Perlu adanya kebijakan daerah yang lebih tegas terkait perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber lain

Suliyanti, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan". *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol 3, No.1.

Zulfiani, 2019, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No.3.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, **Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H**
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu **Nurbeti S.H., M.H**